



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : 72/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN
TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan asesmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, program akreditasi penjaminan mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014 perlu ditingkatkan system dan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk itu perlu dibuat program lanjutan yang berkesinambungan dan dirumuskan menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. bahwa pelaksanaan program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tersebut harus selaras dengan seluruh kebijakan yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

d. bahwa berdasarkan point a, point b, dan point c di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu membuat Surat Keputusan (SK) tentang Pembentukan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
7. Cetak Biru (*Blueprint*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI 2010-2035;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/II/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI/2023 tentang Pembentukan Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH);
13. *International Framework for Court Excellence/IFCE*;
14. ISO 19011: 2012 tentang Panduan Audit;
15. ISO 9001: 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;
16. ISO 31000: 2018 tentang Manajemen Risiko.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025.

KESATU ...

- KESATU : Memerintahkan Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan asesmen;
- KEDUA : Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KETIGA : Bahwa Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau ada perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Salinan putusan ini diberikan kepada anggota tim untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran I :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 72/KPN.W16-U6/SK.OT1/1/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1.	AHMAD HUSAINI, S.H.,M.H. NIP.197501152005021001	KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	KETUA TIM AMPUH (TOP MANAGER)	-
2.	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H. NIP.197504292006042001	WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II	MANAGER REPRESENTATIVE (MR)	-
3.	RIZAL BIDURI, S.H. NIP.197201021994031001	PANITERA	KOORDINATOR TEKNIKAL	-
4.	ANITA SELVIA, S.E. NIP.197807062011012003	SEKRETARIS	KOORDINATOR OPERASIONAL MERANGKAP SEBAGAI KETUA TIM DOCUMENT CONTROL (DC)	-
5.	BUDY IRAWAN, S.IP NIP.198709212006041001	Pt. KASUB BAG. UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA TIM DOCUMENT CONTROL (DC)	-
6.	RIDUAN NIP.198603072005021001	Pt. KASUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	ANGGOTA TIM DOCUMENT CONTROL (DC)	-
7.	YUDIKA AUGUST FERIYANTO, S.AP. NIP.198608222006041008	Pt. KASUB BAG. PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA TIM DOCUMENT CONTROL (DC)	-
8.	CHELVIA, A.Md., S.H. NIP.198611252009042003	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA TIM DOCUMENT CONTROL (DC)	-
9.	ARNOLD JHON HANRY SINAGA, A.Md. NIP.199306242020121006	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	ANGGOTA TIM DOCUMENT CONTROL (DC)	-
10.	OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. NIP.198810282017122002	HAKIM	KETUA INTERNAL AUDITOR (IA)	-
11.	MUHAMMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. NIP.19880908017121001	HAKIM	ANGGOTA INTERNAL AUDITOR (IA)	-
12.	ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H NIP.198909232017121002	HAKIM	ANGGOTA INTERNAL AUDITOR (IA)	-

13.	NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. NIP.199210232017122001	HAKIM	ANGGOTA INTERNAL AUDITOR (IA)	-
14.	ASTERIKA, S.H. NIP.199305262017122001	HAKIM	ANGGOTA INTERNAL AUDITOR (IA)	-
15.	NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H. NIP.199210232017122001	HAKIM	KETUA TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
16.	RIZAL BIDURI, S.H. NIP.197201021994031001	PANITERA	WAKIL KETUA TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
17.	DEWAN HADI SAPUTRO, S.H. NIP. 198712072014031002	PIR. PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
18.	EVI AGUSTINE, S.H. NIP.198608032006042001	PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
19.	SRIPAH NADIAWATI, S.H. NIP. 19861111 200604 2 002	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
20.	KIAN TEGUH, S.H. NIP. 19970422 202012 1 006	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
21.	NOVIRA AMALIA, S.H. NIP. 20011126 202405 2 001	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
22.	NATASHA SRI ULINA SIRINGO- RINGO, A.Md.A.B. NIP. 19980624 202203 2 017	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
23.	YURIS, S NIP. 19710116 201408 1 001	JURUSITA	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
24.	NORYADIN NIP. 19720305 201408 1 001	JURUSITA	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-
25.	SALMIN NIP. 19821014 201001 1 003	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	ANGGOTA SURVEI KEPUASAN PELANGGAN	-

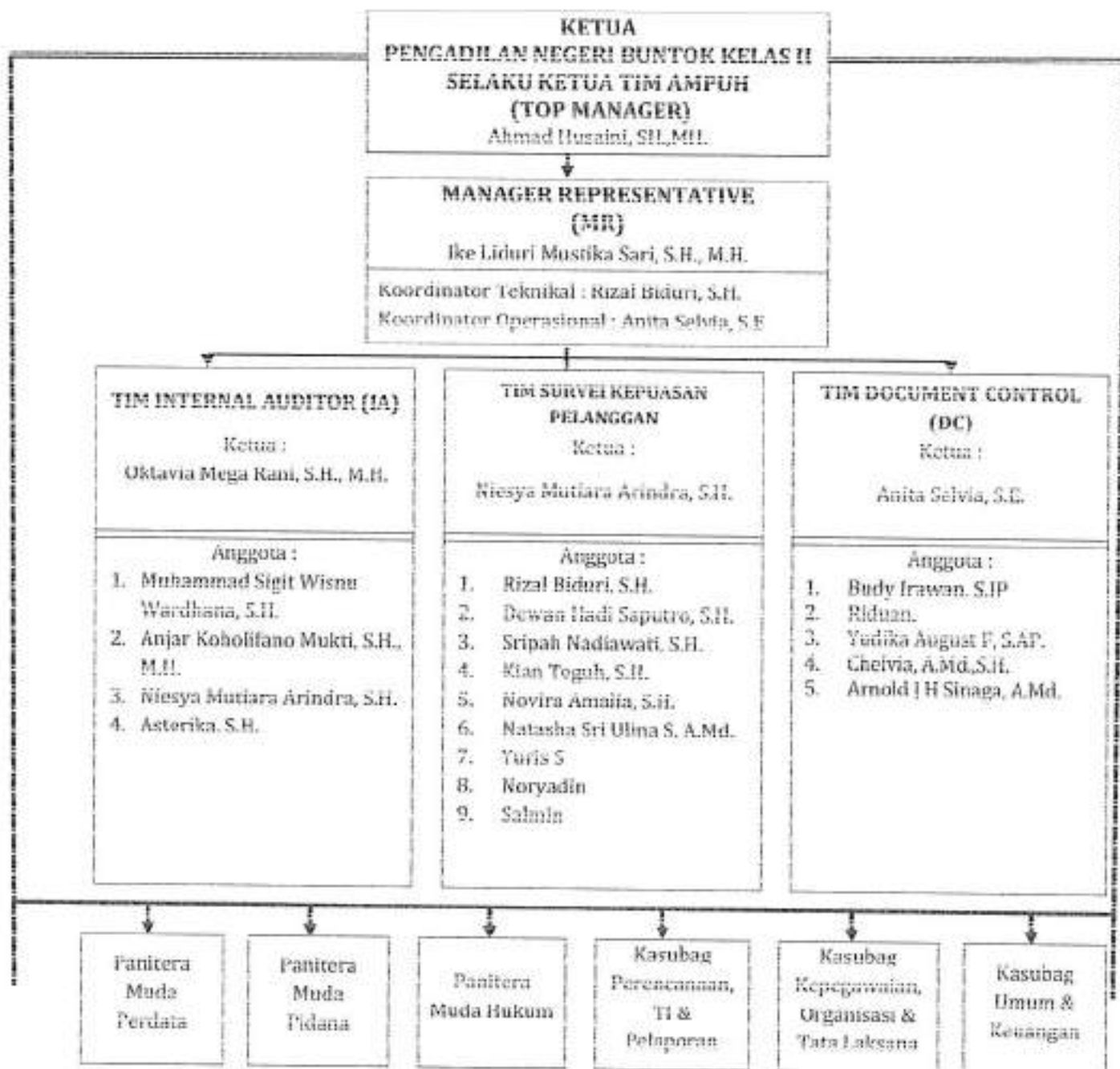


ARMAD HUSAINI

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

Lampiran II :
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
 Kelas II
 Nomor : 72/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025
 Tanggal : 21 Januari 2025

**TIM SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
 PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025**



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
 KELAS II,

 AHMAD HUSAINI